

**PIDATO KENEGARAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE**

**DI DEPAN SIDANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
16 AGUSTUS 1999**

**REPUBLIK INADONESIA**



***BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE***

*Professor Doktor - Ingenieur*

*Presiden Republik Indonesia*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Para undangan dan hadirin yang terhormat;

Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Pada tanggal 17 Agustus esok hari, Insya Allah bangsa Indonesia akan memperingati ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Lima puluh empat tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan serta seluruh rakyat Indonesia telah meraih kemerdekaan serta memprakarsai berdirinya negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan kemerdekaan itu telah banyak mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga para syuhada. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sudah sepantasnyalah kita menundukkan kepala sejenak mengenang jasa-jasa para

pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita wajib bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena nikmat kemerdekaan yang kita peroleh sesungguhnya terwujud atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Hanya bangsa yang pandai mensyukuri nikmat Tuhan-lah yang akan mendapatkan tambahan limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Jika kita menoleh kembali rangkaian perjalanan sejarah perjuangan bangsa, akan terlihat bahwa negara Republik Indonesia terbentuk sebagai hasil dari serangkaian perjuangan revolusi fisik di seluruh wilayah nusantara, dan diplomasi yang gigih di forum internasional. Perjuangan yang gigih itu dilandasi oleh suatu cita-cita bersama, yang didorong oleh keinginan luhur untuk menegakkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Cita-cita bersama itulah yang sesungguhnya mempersatukan bangsa kita. Cita-cita bersama itu pulalah yang mendorong para pejuang bangsa di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta mewujudkan proklamasi kemerdekaan.

Para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan, berkeyakinan bahwa cita-cita untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan itu ditujukan sepenuhnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita dan tujuan --yang kemudian tertuang ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu-- merupakan wawasan bangsa Indonesia tentang masa depan yang hingga kini masih atau bahkan semakin nyata diperlukan dalam menjawab tantangan abad ke-21.

Dengan proklamasi kemerdekaan, bukan berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dalam menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan itu berhenti. Proklamasi kemerdekaan barulah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Republik Indonesia. Seterusnya, bangsa Indonesia yang bersatu dan berdaulat itu, wajib membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Berbagai ujian dalam perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan mempertahankan kemerdekaan terus kita hadapi. Sejak awal kelahirannya, konflik antara bangsa Indonesia dengan negara bekas penjajah tidak terhindarkan. Selama 4 tahun pertama sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang berujung pada kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pada bulan Desember tahun 1949. Dalam konferensi itu tercapai kesepakatan penyerahan kedaulatan dan mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda.

Setelah menjalani revolusi fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan mengalami masa konsolidasi yang juga menuntut berbagai pengorbanan. Pahit getirnya perjuangan membangun identitas diri sebagai bangsa telah kita lalui. Kita pernah menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 yang cukup demokratis. Namun karena ketidakberhasilan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar, maka untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit yang isinya menyatakan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, serta membubarkan Badan Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955. Walaupun sudah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, namun kehidupan demokrasi kita pada waktu itu mengalami kemunduran yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan politik yang sangat berat, dan bermuara pada tumbanganya Orde Lama.

Atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, nilai-nilai kejuangan untuk mengaktualisasikan cita-cita bangsa Indonesia, sekali lagi tampil ke depan. Berkat dorongan semangat juang yang dipelopori oleh generasi muda bangsa --khususnya para mahasiswa yang terhimpun dalam Angkatan 66-- akhirnya kita dapat keluar dari himpitan berbagai krisis pada waktu itu. Sejak itu dimulailah era Orde Baru. Era itu ditandai dengan pembangunan ekonomi berencana. Pada masa Orde Baru, fakta menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, kemiskinan

dapat dikurangi, dan jumlah serta kualitas manusia Indonesia yang terdidik meningkat sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun dapat dipertahankan secara terus-menerus selama lebih dari dua dekade.

Namun disayangkan, perkembangan ekonomi yang sangat pesat di era Orde Baru tersebut tidak diimbangi oleh kehidupan politik dan ekonomi yang demokratis dan transparan. Pada saat yang sama, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, yang antara lain dicirikan oleh liberalisasi perdagangan dan pergerakan modal yang sangat cepat. Terimbasnya Indonesia oleh krisis moneter Asia pada tahun 1997 --yang menyebabkan perekonomian kita mengalami krisis yang parah-- merupakan indikator dari ketidakberhasilan kita mengantisipasi berbagai gelombang tantangan global.

Krisis moneter dan ekonomi kemudian disusul oleh krisis politik, sehingga gerakan reformasi --yang dipelopori oleh generasi muda dan mahasiswa, yang didukung oleh masyarakat luas-- tampil menuntut segera dilakukannya berbagai pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi politik, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan pers yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan jiwa, raga dan pikiran para pejuang reformasi. Sejak itu, secara bertahap mulailah kita memasuki era demokrasi yang tampaknya begitu hiruk-pikuk, namun membuka kesempatan luas bagi peranserta masyarakat. Hal ini menjadikan bangsa kita lebih mampu melakukan perubahan secara bertahap. Perubahan bertahap yang dipercepat lebih menjamin hasil yang paling menguntungkan, dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin. Perubahan yang drastis yang revolusioner, pada kenyataannya seringkali diikuti dengan pengorbanan kehidupan rakyat banyak.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Memasuki milenium ketiga, bangsa kita menghadapi tiga masalah mendasar yang terjadi secara bersamaan. Masalah pertama

bersifat kekinian, yaitu bagaimana mengatasi krisis dan memulihkan kembali dinamika perekonomian nasional berdasar mekanisme ekonomi pasar yang adil, transparan, merakyat, dan menghasilkan produk nasional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kesemua itu dilaksanakan agar pelaksanaan agenda reformasi di berbagai bidang dapat terlaksana lebih baik lagi. Masalah kedua, adalah bagaimana menyelesaikan secara arif dan bijaksana berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi di berbagai daerah yang tidak sedikit menelan korban jiwa dan harta benda. Penyelesaian itu dilaksanakan tanpa mengorbankan proses demokratisasi, serta untuk meningkatkan ketahanan nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagian dari konflik yang terjadi merupakan masalah yang belum terselesaikan --yang terakumulasi di masa lalu-- yang di era demokratisasi ini muncul kembali ke permukaan. Dan masalah ketiga, adalah strategi apa yang akan kita bangun untuk menghadapi masa depan, yang ditandai oleh derasnya arus globalisasi yang dicirikan oleh liberalisasi perekonomian --baik di sektor perdagangan, investasi, maupun aliran modal berjangka pendek -- dalam masyarakat dunia yang lebih sadar akan nilai-nilai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Kita menyadari bahwa ketiga masalah mendasar yang terjadi secara bersamaan itu merupakan ujian berat bagi kelangsungan masa depan bangsa. Pemecahannya memerlukan perhatian, tenaga, sumberdaya, dan suasana kebersamaan serta persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Menghadapi masalah itu, kita sesungguhnya sudah memiliki modal dasar yang kuat, yaitu wawasan yang lengkap dengan jangkauan jauh ke depan, berupa cita-cita dan sistem nilai yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana setiap tindak langkah yang kita lakukan mengacu pada wawasan dan cita-cita tersebut. Dengan perkataan lain, bagaimana kita dapat senantiasa mengaktualisasikan cita-cita tersebut, agar keutuhan kita sebagai bangsa dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Kita yakin, jika kita berpegang teguh kepada cita-cita yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa itu, kita akan mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi secara damai dan bermartabat.

Menjawab ketiga persoalan mendasar tersebut, izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan program-program yang telah dilakukan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

Kita masih ingat, lebih dari setahun yang lalu kehidupan ekonomi kita benar-benar suram. Kita masih ingat bagaimana masyarakat berbondong-bondong menyerbu bank dan menarik simpanannya, karena khawatir uangnya hilang. Dalam kondisi seperti itu, bagaimanapun sehatnya suatu bank, sulit untuk dapat bertahan lama. Operasi normal perbankan terhambat dan bahkan terhenti. Bank merupakan jantung dari denyut nadi perekonomian kita. Dengan terhambat dan terhentinya operasi perbankan, maka ratusan ribu kegiatan perdagangan dan usaha lainnya --yang harus diselesaikan lewat perbankan-- menjadi terhambat atau macet. Kegiatan ekonomi dan perdagangan tidak dapat berjalan normal. Sementara itu, pelarian modal ke luar negeri dalam jumlah besar juga terjadi, sehingga semakin memperparah keadaan.

Pada waktu itu, bukan hanya arus uang yang terganggu. Arus barang pun sangat terganggu oleh penjarahan, pembakaran, teror, dan tindakan kekerasan sosial lainnya. Akibatnya, ketersediaan dan distribusi berbagai komoditas terutama bahan pangan, menjadi langka, sehingga harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Saat itu kita sedang berada di ambang pintu hiperinflasi. Beban terberat dari krisis ekonomi itu dialami oleh mereka yang kurang mampu dan mereka yang kehilangan pekerjaan, yang justru merupakan sebagian besar rakyat yang tidak bersalah. Mereka terhimpit antara harga yang terus membubung dan penghasilan yang pas-pasan, atau mata pencaharian yang tiba-tiba hilang. Dampak krisis ekonomi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Pelayanan kesehatan --terutama bagi yang tidak mampu-- menjadi tidak terjangkau. Anak-anak yang orang tuanya kurang mampu terpaksa berhenti sekolah, dan kekurangan gizi pun terjadi, yang mengancam masa depan anak-anak balita. Dan kesemuanya itu akan melemahkan ketahanan nasional, yang dapat mengakibatkan kebangkrutan ekonomi dan disintegrasi bangsa.

Pada saat itu drama kehidupan sedih makin banyak kita jumpai. Kepercayaan internasional menurun ke titik terendah. Perundingan dengan para pemberi bantuan utama sempat terhenti. Hutang yang membebani sejumlah besar unit usaha --terutama hutang luar negeri-- meningkat, yang ternyata lebih besar dari dugaan semula. Akibatnya, bank-bank dan dunia usaha kita kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, karena proses pembayaran melalui dunia perbankan tidak diterima lagi. Negara kita sempat nyaris terisolasi dari masyarakat internasional, tidak secara fisik tetapi secara ekonomi dan keuangan.

Mengingat kondisi krisis yang begitu hebat yang dialami bangsa Indonesia kurang lebih setahun yang lalu, pada hari ini kita patut bersyukur bahwa keadaan perekonomian kita sudah mulai memasuki tahap pemulihan, dan yang lebih penting, kita sebagai bangsa masih utuh dapat berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain. Kita patut bersyukur pula bahwa kondisi perekonomian dan sosial politik kita tidak terus meluncur ke arah kehancuran. Akhir-akhir ini, alhamdulillah, telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya.

Kini hiperinflasi telah dapat kita hindari, bahkan inflasi telah terkendali secara meyakinkan, misalnya dalam masa 7 bulan pertama tahun kalender 1999 hanya mencapai 1,7%. Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, tingkat harga pada bulan Juli 1999 dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 1999, lebih rendah sebesar 1,27%. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh proses demokratisasi yang kita laksanakan dalam dunia politik. Kepanikan masyarakat untuk memborong barang-barang keperluan pokok juga sudah tidak lagi terjadi. Barang-barang kebutuhan pokok sudah cukup tersedia. Masyarakat tidak ragu lagi menyimpan uangnya di bank, yang memang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Sistem pembayaran nasional mulai berfungsi kembali, dan hubungan perbankan dengan dunia usaha kita ke luar negeri secara bertahap mulai pulih kembali.

Tentu saja semua hasil yang dicapai dalam mengatasi dan memperbaiki perekonomian itu bukan sepenuhnya hasil kerja pemerintah. Juga tidaklah benar bahwa perbaikan ekonomi terjadi

karena faktor eksternal saja. Semua itu adalah hasil karya seluruh rakyat Indonesia, yang dalam masa-masa sulit dan penuh cobaan, secara bahu-membahu berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi. Lebih dari itu kita percaya bahwa perbaikan nasib bangsa --dalam hal ini perbaikan perekonomian-- tidak ditentukan hanya oleh usaha dan perjuangan kita semata, tetapi atas berkat pertolongan dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Kabinet Reformasi Pembangunan dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dalam waktu kurang lebih satu tahun telah berupaya sekuat tenaga untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk lagi. Upaya tersebut diawali dengan pengenalan masalah yang dihadapi, bukan hanya gejalanya saja, tetapi juga akar permasalahannya. Atas dasar pengenalan itu kita mengambil langkah-langkah, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, yang menjangkau jauh ke depan.

Upaya jangka pendek yang ditempuh adalah menciptakan stabilisasi ekonomi makro dan mikro, restrukturisasi perbankan, dan penyelesaian hutang swasta, serta pemulihan sektor riil. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dijadikan program utama Kabinet Reformasi Pembangunan untuk mengurangi beban masyarakat yang semakin berat --terutama masyarakat miskin-- yang terjadi sebagai dampak dari krisis ekonomi. Program Jaring Pengaman Sosial tersebut meliputi penyediaan pangan dan obat-obatan, penciptaan kesempatan kerja, dan pencegahan agar anak-anak tidak putus sekolah. Bersamaan dengan itu, kebijakan moneter yang ketat diterapkan untuk meredam kegiatan spekulatif yang dapat menyebabkan menurunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, serta untuk mencegah kenaikan harga barang secara tidak terkendali. Kebijakan moneter ketat --yang dilakukan dengan terus-menerus memperhatikan perbaikan sosial ekonomi, politik dan budaya-- ternyata telah menumbuhkan kembali kepercayaan luar negeri, dan yang lebih penting lagi pulihnya rasa percaya diri kita sendiri. Pemecahan permasalahan perbankan dan hutang swasta --baik domestik maupun luar negeri-- memang tidaklah mudah, karena bersifat kompleks dan berdimensi besar. Sekalipun demikian

program restrukturisasi tersebut telah banyak mengalami kemajuan, khususnya dalam dunia perbankan.

Kita menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis moneter adalah kelemahan sistem perbankan yang telah memperburuk kondisi dunia usaha. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta berada pada tempat yang sentral. Keberhasilan pemulihan perekonomian nasional sangat tergantung pada kemampuan kita menyetatkan perbankan dan membangkitkan kembali dunia usaha. Beratnya masalah perbankan yang kita hadapi, membawa konsekuensi pada proses pemulihannya yang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Biaya rekapitalisasi perbankan diperkirakan lebih dari Rp 300 triliun. Sekalipun demikian kita harus melakukannya, karena upaya ini diharapkan dapat mewujudkan perbankan dan perusahaan nasional yang sehat, andal dan tangguh. Namun kunci keberhasilan ini akhirnya ditentukan oleh iktikad manusianya sendiri, khususnya para pelaku ekonomi, yang harus mengubah mentalitas dan perilaku mereka untuk bersikap lebih transparan, arif, adil dan jujur, termasuk bebas dari KKN.

Likuidasi 38 bank, pengambilalihan 7 bank, dan rekapitalisasi 9 bank yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dilakukan dengan tegas tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok. Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada investor yang berminat. Perkembangan restrukturisasi perbankan ini cukup menggembirakan. Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa diantaranya telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri yang dapat memperkuat posisi rupiah.

Di sektor riil, pemerintah melakukan restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta kepada perbankan nasional. Bagi perusahaan yang masih relatif baik keadaan aliran kasnya, dan yang mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki perusahaannya, pemerintah akan membantu penjadwalan kembali penyelesaian hutang-hutang perusahaan bersangkutan. Namun bagi perusahaan

yang berprospek buruk dan tidak mempunyai iktikad baik, pilihannya adalah dipailitkan. Restrukturisasi penyelesaian hutang-hutang swasta domestik ini difokuskan pada debitur-debitur besar. Reaksi terhadap restrukturisasi perbankan dan sektor riil cukup baik, antara lain tercermin pada menguatnya indeks harga saham di pasar modal.

Upaya-upaya jangka pendek telah mulai menunjukkan hasil nyata yang menjanjikan. Program-program dalam rangka menciptakan jaring pengaman sosial telah dilaksanakan. Program Jaring Pengaman Sosial --terutama di bidang kesehatan dan pendidikan-- telah berhasil membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping pemerintah, para anggota masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meskipun menghadapi masa-masa sulit, secara spontan para pengusaha swasta masih turut serta membantu meringankan beban yang diakibatkan oleh krisis yang berat itu. Hal ini sangat membesarkan hati kita, karena kesetiakawanan sosial ternyata tidak pernah surut walaupun di masa krisis, bahkan tampil lebih kuat.

Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita redam melalui Program Jaring Pengaman Sosial tersebut. Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan harga murah kepada sekitar 10 juta keluarga, menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang orang tuanya kurang mampu, dan bantuan operasional bagi sekitar 130 ribu sekolah dan madrasah di seluruh tanah air. Kita juga telah menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 Puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh tanah air. Jika terdapat kelemahan dan kebocoran dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial --sebagaimana dikritik oleh beberapa pihak-- tentunya harus kita koreksi dengan memperhatikan masukan objektif dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya.

Jumlah kasus penyimpangan yang ditemukan dan dilaporkan sebenarnya relatif sangat kecil dibandingkan dengan sasaran total Program Jaring Pengaman Sosial. Meskipun demikian, saya telah menginstruksikan agar instansi-instansi pelaksana Program Jaring Pengaman Sosial memperhatikan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan tersebut secara tuntas. Aparat pemerintah daerah harus pro-aktif mengamankan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial di lapangan. Nasib saudara-saudara kita yang kurang mampu, di masa krisis ini tidak boleh menjadi korban kelambanan birokrasi atau menjadi permainan untuk kepentingan politik. Mereka masih memerlukan dukungan dan bantuan kita semua.

Beberapa indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita telah mulai memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik kotor yang secara berturut-turut positif pada triwulan I dan triwulan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,34% dan 0,47% terhadap triwulan sebelumnya. Begitu pula harga-harga sudah stabil, yang ditunjukkan oleh inflasi yang rendah bahkan terjadi deflasi selama 5 bulan terakhir, sejak bulan Maret sampai Juli 1999, berturut-turut sebesar -0,18%, -0,68%, -0,28%, -0,34%, dan -1,05%. Nilai tukar rupiah juga terus menguat. Dalam triwulan kedua tahun kalender 1999, rupiah terus menguat dari Rp 8.650,- per satu dolar AS pada bulan April menjadi sekitar Rp 6.700,- per satu dolar AS pada bulan Juli 1999. Padahal 14 bulan yang lalu nilai rupiah masih sekitar Rp 15.000,- per satu dolar AS. Relatif melemahnya nilai rupiah belakangan ini ke angka mendekati Rp 8.000,- per satu dolar AS, terjadi karena pengaruh eksternal yang kurang menguntungkan dan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi perbankan.

Menghadapi hal ini, pemerintah secara bersungguh-sungguh berupaya menyelesaikan permasalahan yang menghambat restrukturisasi perbankan tersebut, sehingga kita harapkan rupiah dapat segera menguat kembali. Dengan menguatnya rupiah, terkendalinya inflasi, sukubunga juga terus menurun. Sukubunga Sertifikat Bank Indonesia untuk jangka waktu satu bulan --yang

sering dipakai sebagai rujukan-- juga terus menurun menembus angka di bawah 13,5%. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu sukubunga Sertifikat Bank Indonesia masih sekitar 70%. Cadangan devisa kotor kita sekarang telah mencapai 26,5 milyar dolar AS dibanding 18,7 milyar dolar AS setahun yang lalu. Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkan modalnya di pasar modal, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan yang pada bulan September tahun 1998 sekitar 250, sekarang telah meningkat di atas 550. Kesemua indikator ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang menuju ke arah perbaikan.

Pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga mendapat prioritas karena merupakan 99% dari pelaku ekonomi nasional dan menyerap 88% tenaga kerja. Pelaku-pelaku ekonomi rakyat tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar r.upiah serta ikut menentukan tingkat inflasi nasional. Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita harapkan usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga dapat berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar.

Meskipun beberapa indikator ekonomi itu menunjukkan hal-hal yang menggembirakan, namun disadari sepenuhnya bahwa ekonomi kita belum sepenuhnya pulih dalam pengertian masih jauh dari yang kita cita-citakan. Masih banyak orang kehilangan pekerjaan dan belum memperoleh kembali peluang untuk bekerja, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah. Jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 6,1 juta jiwa. Bahkan akhir-akhir ini penyerapan tenaga kerja menunjukkan gejala melamban. Dunia usaha masih belum bangkit, selain dikarenakan beban hutang yang besar, juga disebabkan oleh permintaan pasar dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, proses perbaikan ekonomi masih terganjal oleh gelombang unjuk rasa, gangguan keamanan dan isu-isu yang tidak berdasar dan tidak menguntungkan.

Dalam jangka menengah kita sedang meletakkan landasan

bagi kehidupan perekonomian yang maju, mandiri dan berkualitas, serta mengandalkan pada sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi, di mana kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan akan terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak. Kita sedang membangun institusi-institusi ekonomi agar dapat berfungsi dengan baik dalam sistem ekonomi pasar dalam negeri dan global, yang makin tidak mengenal batas-batas wilayah negara.

Berbagai peraturan dasar sebagai landasan hukum bagi perkembangan ekonomi pasar secara mandiri sudah kita miliki. Peraturan dimaksud antara lain, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan 3 Undang-undang serta 1 Keputusan Presiden yang terkait dengan ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Dengan diratifikasinya 4 konvensi tentang perburuhan tersebut, maka secara keseluruhan sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Buruh Internasional, telah diratifikasi 7 konvensi internasional tentang perburuhan.

Berkaitan dengan disahkannya berbagai peraturan tersebut, maka penguatan sistem hukum dan reformasi birokrasi pegawai negeri sipil menjadi sangat penting. Supremasi hukum harus ditegakkan. Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) harus dihapuskan. Dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil harus ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang netral. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Dengan pegawai negeri sipil yang netral dan bebas dari pengaruh politik praktis, pelayanan pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah jelas akan meningkat kualitasnya.

Dalam pemberantasan KKN, kita menyadari sepenuhnya bahwa penanganannya tidaklah mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu sekejap. Permasalahannya sudah berakumulasi dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga dan dukungan sumber daya yang tidak sedikit. Di samping itu diperlukan pula pengertian dan kesabaran, tanpa melalaikan kewaspadaan terhadap praktek KKN yang jelas harus kita berantas. Selain itu, dalam penanganannya kita harus tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum dan hak-hak asasi yang diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Kita tidak bisa menegakkan hukum dengan cara-cara melanggar hukum. Kita harus memperlakukan pihak tersangka sebagai orang yang tidak bersalah, sampai pengadilan membuktikannya bersalah. Kita juga tidak bisa membiarkan seseorang diadili oleh media, sehingga dapat mengakibatkan masyarakat sudah menghakimi orang itu bersalah, sebelum melalui proses pengadilan.

Dalam hal penanganan masalah KKN, tahap pemahaman masalah dan pengenalan akar penyebabnya sudah kita tempuh dan kita pahami. Tahap pengendalian dampak yang ditimbulkan --bahkan upaya untuk mencegah berlanjutnya kerugian negara-- sudah kita lakukan. Banyak kontrak dan hubungan kerja yang menyebabkan kerugian negara sudah kita tinjau kembali. Pemerintah juga sudah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah KKN. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah tumbuh dan giat melakukan pengumpulan data tentang KKN, bahkan beberapa menyampaikannya secara langsung kepada saya. Tanpa mengurangi penghargaan kita terhadap peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, kalau tidak berhati-hati seringkali tindakan ini lebih memicu kontroversi yang bernuansa politis, daripada mengarah pada penyelesaian masalah secara hukum. Marilah kita kembali kepada pokok utama perhatian kita, yaitu pada upaya membasmi KKN dalam segala bentuk, dan tidak menjadikannya sekedar komoditas untuk popularitas dalam permainan politik. Sejauh ini

banyak kasus KKN yang telah diselesaikan, namun kurang mendapat perhatian masyarakat, karena mungkin perhatian yang terlampau besar diberikan pada kasus-kasus yang bernuansa politis. Peran masyarakat sangat diharapkan dalam upaya ini, namun hendaknya tetap disalurkan melalui jalur dan prosedur hukum yang berlaku.

Tahap mengadili beberapa kasus KKN yang sudah lengkap barang buktinya juga sudah digelar, dan sebagian lagi sedang diproses untuk segera diajukan ke pengadilan. Dalam periode 1 April 1998 sampai dengan 31 Maret 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595%, penyidikan naik sekitar 349% dan penuntutan naik sekitar 321%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sejumlah kasus KKN yang sudah ditangani itu, temuan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 7,2 triliun. Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat.

Peraturan perundangan yang diperlukan sebagai dasar untuk penindakan KKN juga perlu diperbaharui, dan kita baru saja mensahkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN". Begitu pula pembaharuan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dibahas bersama DPR dan Insya Allah dalam waktu dekat dapat segera disahkan. Semua itu, kita tempuh dalam waktu 14 bulan.

Sehubungan dengan usaha untuk mengatasi KKN itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak bisa dengan tergesa-gesa dan gegabah melakukan penyidikan dan penuntutan, terutama jika barang bukti yang akan diajukan di pengadilan tidak lengkap dan tidak meyakinkan. Kita dapat saja --demi mencari popularitas misalnya-- menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Namun, sekali cara yang tidak adil ini kita tempuh, berarti kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadilan dan

perlindungan hak-hak asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dari itu, jika cara itu yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama --yaitu pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum-- dalam menangani masalah KKN.

Jalan pemulihan ekonomi kita masih panjang, serta membutuhkan perhatian dan pendekatan yang sistematis, profesional, dan terpadu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengemukakan beberapa agenda lebih lanjut dari upaya pemulihan ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama:

Pertama, kita harus secara terus-menerus berupaya mengembalikan dan memelihara suasana yang memberikan rasa aman, tenteram dan kepastian berusaha bagi semua pelaku ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Penciptaan suasana yang mendukung ini merupakan landasan penting bagi Bergeraknya kembali roda perekonomian kita.

Kedua, kita harus menuntaskan program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Hanya perbankan yang sehat yang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi kita. Pengelolaan bank-bank harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan integritasnya tidak diragukan. Industri perbankan kita harus kuat dan mampu menerapkan secara penuh standar dan praktek perbankan internasional.

Ketiga, kita perlu secepatnya menyelesaikan hutang-hutang swasta, agar perusahaan-perusahaan swasta dapat segera beroperasi normal kembali. Kerangka penyelesaian hutang melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia atau INDRA dan Prakarsa Jakarta yang telah kita ciptakan perlu makin diefektifkan.

Keempat, kita perlu memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara di masa yang akan datang. Dalam tahun anggaran ini, sumber-sumber pembiayaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara kita cukup aman, apalagi dengan kepastian dukungan negara-negara yang

tergabung dalam Consultative Group for Indonesia (CGI) baru-baru ini. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya, pengeluaran akan bertambah terutama karena beban pembayaran bunga untuk program rekapitalisasi perbankan akan mencapai titik puncaknya pada masa dua tahun mendatang. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat akibat tertundanya pemeliharaan prasarana dan sarana karena keterbatasan dana selama masa krisis, dan besarnya kebutuhan dana untuk membangun kembali prasarana dan sarana di daerah-daerah yang rusak dilanda kerusuhan.

Untuk mengurangi ketergantungan kita pada hutang luar negeri, kita perlu melaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara secara konsisten agar diperoleh nilai tambah dari keuntungan dan nilai pasar yang tinggi melalui swastanisasi. Dengan melepaskan 49% saham Badan Usaha Milik Negara tertentu --yang berarti mayoritas saham masih dimiliki pemerintah-- dalam kurun waktu 1999 sampai 2005, diperkirakan kita mampu mengumpulkan dana sebesar 91 milyar dolar AS. Dana ini dapat kita gunakan untuk membayar hutang pemerintah. Selain itu, kita juga harus meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak. Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Kotor baru mencapai 11%. Apabila dalam waktu 5 tahun yang akan datang, Indonesia mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Kotor menjadi 16%, maka pendapatan negara dapat ditingkatkan antara 5 sampai 7 milyar dolar AS per tahun. Apabila program swastanisasi Badan Usaha Milik Negara dan optimalisasi penerimaan pajak dapat kita lakukan dengan berkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akan mampu mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri, dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri, serta dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kelima, kita harus mereformasi kelembagaan yang mendukung perekonomian. Di tingkat mikro, kita secara bertahap harus mengubah praktek-praktek bisnis yang tidak sehat dan merugikan rakyat. Di tingkat makro, penataan kelembagaan kita wujudkan

antara lain dengan menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mandiri dengan satu tugas utama, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan kualitas mata uang rupiah. Kita menginginkan agar rupiah dapat menjadi mata uang yang berkualitas, dalam pengertian stabil nilainya baik terhadap mata uang asing maupun dari sisi daya belinya terhadap barang-barang dan jasa dalam negeri. Dengan adanya kestabilan nilai rupiah, kita harapkan para pelaku ekonomi dapat memusatkan perhatiannya kepada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan usahanya, sehingga tidak lagi menghabiskan energinya untuk melindungi kegiatan usahanya atau justru berspekulasi untuk mencari keuntungan dari ketidakstabilan rupiah. Jangan sampai rupiah diperdagangkan sebagai saham suatu perusahaan pada bursa, tanpa adanya peraturan pengawasan.

Rupiah yang stabil akan mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, sehingga kegiatan usahanya tidak semata ditujukan untuk mengejar peningkatan laba saja, tetapi pertumbuhan produksi dan pemasarannya, serta peningkatan kualitas produk, juga diperhatikan. Bila kondisi ini tercapai, maka daya saing produk kita di pasar domestik dan global akan menguat dan ekspor kita akan meningkat. Dengan demikian, terjadilah sinergi positif antara efisiensi dan produktivitas dengan nilai dan kualitas rupiah. Wawasan mengenai sinergi proaktif positif antara sektor riil dan sektor moneter inilah yang melandasi langkah-langkah yang saya sebutkan tadi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Perkembangan politik Indonesia dalam memasuki milenium ketiga menghadapi babak baru yang tidak mudah. Di satu pihak masyarakat menghendaki partisipasi politik yang lebih luas dan lebih otonom, sementara di lain pihak kita dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab politik warga negara terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Lumpuhnya kekuatan politik dan ekonomi komunis di tingkat internasional telah menciptakan gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia. Gelombang

demokratisasi ini berlangsung seiring dengan arus globalisasi perekonomian. Dalam menghadapi perubahan di tingkat global yang cepat, kita tetap dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita dituntut pula untuk memelihara keserasian dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara negara dengan masyarakat, dan antara kondisi ideal dengan realita, demi terpeliharanya dan kokohnya ketahanan nasional.

Belajar dari sejarah perjalanan politik bangsa kita selama 54 tahun, dan pengalaman singkat dalam era reformasi, kita harus senantiasa memantapkan konsolidasi demokrasi. Untuk itu, sejalan dengan upaya kita membangun kedaulatan politik, kita juga harus mengembangkan budaya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan aspirasi. Untuk dapat melalui masa transisi dalam rangka konsolidasi demokrasi itu, diperlukan langkah-langkah penting, antara lain pembaharuan aturan perundangan, pengembangan lembaga-lembaga demokrasi yang memungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan secara jelas baik kewenangan maupun tanggungjawabnya, disertai peningkatan kesadaran dan pelaksanaan etika politik.

Dalam rangka menjalankan langkah-langkah transisi menuju demokrasi itu, dalam waktu kurang dari setahun Kabinet Reformasi Pembangunan bekerjasama dengan DPR telah melakukan perbaikan dan pembaharuan peraturan perundangan yang menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik yang demokratis. Tiga Undang-undang di bidang politik --yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, serta mengenai susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD-- yang kesemuanya telah dijadikan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Pemerintah juga telah mengatur agar TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil tidak lagi memihak kepada salah satu kekuatan politik tertentu dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. Hasilnya adalah terlaksananya Pemilu yang lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, seperti telah diungkapkan oleh para pengamat, dari dalam maupun luar negeri.

Sehubungan dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu itu, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan tersebut. Kemenangan dan kepercayaan rakyat Indonesia itu hendaknya menjadi acuan moral yang membimbing setiap wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya. Secara khusus, ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan --sebagai peraih suara terbanyak-- demikian juga kepada Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, sebagai partai yang berhasil meraih lebih dari 2% suara langsung dari rakyat pada Pemilu 1999, dan merupakan 6 partai besar yang akan duduk di DPR dan MPR nanti. Kepada partai-partai lain yang berhasil meraih kursi di DPR dan MPR, namun tidak termasuk dalam kategori 6 besar, saya juga mengucapkan selamat.

Dengan selesainya salah satu tahap dalam Pemilu tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa pengembangan struktur dan proses politik yang lebih transparan dan otonom telah mewarnai perjalanan kita menuju demokrasi. Pemerintah tidak lagi memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaannya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian besar anggotanya merupakan wakil partai politik peserta Pemilu. Pemerintah lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Demikian pula halnya dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu, pemerintah tidak lagi dominan. Bukan hanya lembaga pemantau dalam negeri saja yang diberi kesempatan, pemantau dari luar negeri juga diberi keleluasaan.

Makin besarnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu, menunjukkan bahwa kita telah mewujudkan salah satu dari bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi kita. Rakyat telah diberi kebebasan untuk berserikat dan menyatakan pendapat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, dan masih dalam rambu-rambu hukum berdasar konstitusi dan peraturan perundangan yang ada.

Untuk menjamin terselenggaranya kebebasan dalam menyatakan pendapat, pemerintah telah membuka ruang yang cukup

luas bagi dunia pers untuk berkiprah sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggungjawab diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sarana pengawasan sosial yang andal untuk ikut membangun pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pengembangan demokrasi tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan pada aturan hukum saja. Ia juga sangat memerlukan serangkaian komitmen etik demi terbangunnya budaya politik yang bermoral dan sehat. Pers yang bebas dan bertanggung jawab juga diharapkan dapat memainkan peran dalam mengembangkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberitaan media massa seyogyanya tidak hanya mengejar sensasi, tetapi mengutamakan penyampaian nilai-nilai kebenaran dari suatu informasi kepada masyarakat luas. Pengungkapan atas sesuatu kenyataan secara lengkap akan sangat membantu proses pencerahan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebaliknya dramatisasi atas sebagian fakta dan menyembunyikan fakta lain adalah suatu pelanggaran etik yang tidak bertanggung jawab yang selayaknya dihindari.

Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pemerintah bersama DPR telah mensahkan Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Intinya, Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain.

Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan POLRI dari ABRI. Pemisahan tersebut berimplikasi terhadap pembaharuan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara dan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara. Dengan berpisahnya POLRI dari ABRI,

maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan sistem penyelenggaraan pembinaan POLRI pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Di masa depan, kita menginginkan terwujudnya polisi masyarakat. Polisi masyarakat adalah polisi yang mengenali masyarakat yang dilayaninya dan masyarakat juga mengenali polisi yang melayaninya. Kita tidak menginginkan polisi yang sekedar menjadi alat kekuasaan. Kita juga menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani, karena polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum, dan dicintai karena polisi selalu mengutamakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan POLRI dalam meningkatkan rasa aman masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu POLRI menegakkan ketertiban dan keamanan. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap POLRI yang menyangkut aspek struktural, instrumental dan kultural.

Bersamaan dengan berpisahnya POLRI dari ABRI, dilakukan pula penggantian istilah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Penggantian istilah ini dimaksudkan untuk menandai perbedaan peran ABRI di masa lalu dengan peran TNI sekarang dan di masa depan sebagai salah satu pelopor reformasi. Sebagaimana kita rasakan dan saksikan bersama, pada era reformasi ini ABRI banyak mendapatkan kritik atas peran masa lalunya. Menghadapi suasana dan gelombang kritik itu, TNI tetap tegar dan secara tepat memposisikan perannya, seraya terus mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, mencegah disintegrasi nasional dan mengawal jalannya reformasi, terutama untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. TNI berada dalam proses melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya dalam kehidupan bangsa.

Beberapa perubahan mendasar dalam peran sosial politik TNI telah diimplementasikan dalam sejumlah doktrin, konsep, kebijakan dan aksi nyata di lapangan. Ini antara lain terlihat dari netralitas TNI dalam Pemilu yang lalu, likuidasi staf sosial politik serta badan pembina kekaryaan, dan kebijakan pensiun bagi anggota TNI yang menduduki jabatan birokrasi sipil dan jabatan politik di luar DPR dan DPRD. TNI akan terus melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya di masa depan, sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat yang terus berkembang. TNI akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai Bhayangkari Negara, pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang baik bagi rakyat, adalah baik bagi TNI.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat;

Seperti telah saya kemukakan tadi, di tengah upaya kita untuk mengatasi dan memulihkan krisis ekonomi serta melaksanakan agenda reformasi --sebagaimana telah dimandatkan oleh Sidang Istimewa MPR Tahun 1998-- kita juga terpaksa menghadapi berbagai masalah konflik sosial dan politik yang menggunakan cara-cara kekerasan. Konflik sosial yang bersifat horizontal memang bisa terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di dalam suatu komunitas yang bersifat plural. Kalau ada faktor pemicu yang kemudian dieksploitasi secara sistematis, bukan tidak mungkin dapat menciptakan ketidakserasian atau bahkan keretakan dalam hubungan sosial. Pemecahan untuk permasalahan ini tidaklah mudah dan menghendaki kerja keras dan kesabaran kita semua. Kuncinya terletak pada upaya kita untuk membangun suatu tatanan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang hidup secara plural, demokratis, kosmopolitan dan mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Peran pemerintah adalah menciptakan suasana psikologis dan kultural yang mendukung dan memberikan jaminan politik dan hukum serta menyediakan infrastruktur sosial yang diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani.

Dalam menangani konflik sosial ini pemerintah lebih menekankan pada lahirnya kesadaran kolektif untuk hidup bersama secara damai. Inisiatif untuk itu diupayakan datang dari tokoh-tokoh masyarakat dari segala lapisan dan golongan yang mengalami konflik itu sendiri. Sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik, adalah mencegah berlanjut dan meluasnya konflik yang ada atau mengisolasi konflik yang ada, menegakkan kembali ketertiban umum sehingga tercipta suasana yang memungkinkan terjadinya dialog yang hakiki di antara tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik, demi tercapainya penyelesaian konflik yang juga dapat mendukung kokohnya stabilitas dan ketahanan nasional.

Adapun konflik yang bernuansa politik dapat disebut sebagai konflik vertikal, yang terjadi sebagai hasil eksploitasi ketidakpuasan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Terbukanya kembali kesempatan di era demokratisasi ini telah memberi peluang yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dalam memperjuangkan kepentingannya. Pemerintah bersikap akomodatif dan responsif terhadap berbagai wacana yang berkembang, karena itu merupakan salah satu cara yang demokratis untuk membangun opini publik. Namun sangat disayangkan bahwa tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat tertentu justru memilih cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan dirinya.

Suasana konflik --seperti di Aceh misalnya yang sesungguhnya sudah mulai mereda di awal era reformasi-- akhir-akhir ini diperburuk oleh meningkatnya eskalasi gerakan bersenjata pengacau keamanan. Gerakan ini bergandengan tangan dengan kegiatan provokasi dan demonstrasi yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda dari rakyat yang tidak bersalah. Tuntutan untuk menarik Pasukan Penindak Rusuh Massa dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanpa diimbangi oleh peletakan senjata dari para pengacau keamanan, justru akan menempatkan masyarakat dalam bahaya, tanpa perlindungan. Karena itu saya menghimbau kepada mereka yang terlibat dalam gerakan bersenjata pengacau keamanan dan kepada pihak-pihak yang memperkeruh suasana untuk segera

menghentikan tindak kekerasan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kita harus menghentikan tindak kekerasan untuk dapat membantu rakyat di Aceh yang sekarang kehidupannya terhimpit berbagai kesulitan. Utamakanlah keselamatan rakyat banyak. Tanpa berupaya menghentikan kekerasan dan kekacauan, hal itu berarti kita mengingkari hak asasi rakyat untuk hidup bebas dan damai.

Selanjutnya pada kesempatan ini, saya mengajak agar di era demokrasi, semua persoalan selayaknya kita selesaikan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab, bukan dengan cara-cara kekerasan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, saya telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang aggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan daerah sesuai saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Komisi ini sudah mulai melaksanakan tugasnya. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan obyektif dan arif kepada Presiden dalam mengusut secara tuntas kasus pelanggaran HAM di Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi menekankan, bahwa komitmen pemerintah terhadap masyarakat Aceh tetap berlaku dan akan diwujudkan sesuai rencana dalam waktu yang sesingkatnya. Saya menyambut positif prakarsa DPR-RI untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Propinsi Aceh dalam urusan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, sebelum dan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang dan para pahlawan nasional dari Aceh tanpa mengenal lelah --bersama saudara-saudaranya dari daerah lain-- berjuang dengan gigih mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka. Sumbangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sumbangan pesawat terbang pertama bagi negara Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ketika hampir seluruh wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh pejah --masyarakat Aceh dengan semangat juangnya yang tak

kenal menyerah-- mampu mempertahankan benteng terakhir Ibu Pertiwi yaitu Tanah Rencong, sehingga eksistensi Negara Republik Indonesia tetap berdiri tegak. Pada masa itu dari Aceh-lah perjuangan diplomasi kita dikumandangkan ke dunia internasional. Dalam masa pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan, juga banyak sumbangan pemikiran yang lahir dari masyarakat Aceh, misalnya gagasan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akhirnya diterapkan di seluruh propinsi.

Akhir-akhir ini, saudara-saudara kita di Aceh menghadapi kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Penderitaan masyarakat Aceh, adalah penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Saya sangat memahami dan dapat merasakan betapa beratnya penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Aceh. Beberapa waktu yang lalu, saya mengunjungi Aceh dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas untuk berdialog dengan masyarakat Aceh. Tujuan dan niat saya hanya satu, yaitu agar berbagai persoalan dan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dapat segera berakhir, sehingga saudara-saudara kita yang hidup di Aceh dapat kembali menikmati kehidupan yang normal, yang ramah, sejahtera, adil dan bermartabat, sebagaimana dinikmati oleh saudara-saudaranya di daerah lain.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dengan saudara-saudaranya di Aceh dalam membantu meringankan beban penderitaan yang sedang dialami. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk memecahkan persoalan Aceh tidak lagi dengan pendekatan keamanan, namun dengan pendekatan terpadu secara struktural dan kultural. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam suasana aman dan damai, yang dilandasi oleh penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak-hak asasi manusia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan hati yang tulus dan niat yang baik, saya mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama seluruh komponen

bangsa Indonesia menyelesaikan semua permasalahan yang menimpa masyarakat Aceh secara penuh kekeluargaan. Betapapun beratnya masalah yang dihadapi kalau ada niat baik di dalam hati kita untuk memperbaiki dan mempererat tali silaturahmi, Insya Allah akan dapat kita selesaikan dan mendapat pertolongan Allah SWT. Kita meyakini bahwa memperbaiki dan mempererat tali silaturahmi sangat dicintai oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah SWT.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Kalau kita renungkan lebih dalam, dan kita memandang berbagai konflik yang bernuansa politik tersebut dari sudut pandang yang positif, terjadinya konflik tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari belum mampunya kita selama ini mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena itu, salah satu upaya mendasar untuk mengaktualisasikan kembali cita-cita itu, dalam waktu kurang lebih setahun, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya meletakkan dasar-dasar bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Pemerintah bersama DPR telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih berkeadilan. Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada intinya memuat:

Pertama, komitmen terhadap demokratisasi. Hal ini terlihat dari pola rekrutmen politik dan dimensi pengesahan kebijakan Pemerintah Daerah. Nuansa demokratisasi dapat dilihat dari rekrutmen politik terutama dalam rangka pengisian jabatan Bupati atau Walikota dan wakil-wakilnya yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui wakilnya di DPRD. Untuk jabatan Gubernur/Wakil Gubernur --karena juga merupakan wakil Pemerintah Pusat-- masih dikonsultasikan dengan Presiden. Namun, dalam pemilihannya Presiden dan Pemerintah Pusat

tidak terlibat atau turut campur tangan seperti di masa lalu. Demikian pula halnya dengan kebijaksanaan daerah. Kalau sebelumnya semua Peraturan Daerah harus disahkan oleh Pemerintah Pusat, maka sekarang semua Peraturan Daerah --setelah disepakati oleh DPRD dengan Gubernur, Bupati atau Walikota-- dapat langsung dilaksanakan.

Kedua, dengan prinsip otonomi penuh, pada dasarnya Pemerintah Daerah berhak memperoleh semua kewenangan pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan daerah, kecuali lima bidang, yaitu pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kebijakan moneter dan keuangan, sistem peradilan dan administrasi pemerintahan di bidang keagamaan. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sesuai kesiapan masing-masing daerah. Prinsip otonomi ini akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mengandalkan pada pengembangan sumber daya manusia yang berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk lebih terampil dalam mengolah potensi daerah. Kesemuanya itu akan meningkatkan daya saing dan ketahanan nasional melalui peningkatan ketahanan dan daya saing daerah.

Ketiga, dalam hal keuangan, daerah akan mendapat porsi yang sangat adil dan wajar, sesuai dengan potensi yang secara nyata dimilikinya. Asas keadilan dan kewajaran ini penting, karena kita sebagai bangsa yang telah sepakat hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus saling bantu-membantu. Daerah yang memiliki potensi ekonomi yang kuat justru akan dapat membantu daerah yang masih belum mendapat kesempatan berkembang, melalui kebijakan subsidi silang yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan rakyat kepada Pemerintah Pusat.

Sementara itu, cita-cita perjuangan kemerdekaan juga menghendaki tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila -- yaitu sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang telah dirumuskan pada tahun 1945 oleh para pendiri bangsa mendahului dikeluarkannya Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun

1948. Tekad pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perlindungan HAM, antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak dibentuk pada tahun 1993, KOMNAS HAM telah mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan HAM, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu:

Pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang HAM yang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional secara menyeluruh.

Kedua, penyebarluasan dan pendidikan HAM, baik kepada jajaran penyelenggara negara maupun kepada masyarakat luas.

Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan HAM yang paling mendasar, yang pelanggarannya akan merupakan pelanggaran berat terhadap HAM, dan harus dipertanggungjawabkan secara internasional.

Keempat, pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan PBB yang bersangkutan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang HAM, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang "Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia", dan Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang "Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial". Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja

paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah mengambil langkah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan HAM secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Maksud dari penandatanganan konvensi tersebut adalah untuk membangun nilai-nilai dalam pergaulan kita sebagai bangsa yang menghargai manusia bukan karena rasnya atau etnisnya atau gender-nya, tetapi karena kemampuan dan budi-pekertinya. Sejarah membuktikan bahwa toleransi antar ras dan suku bangsa tidak saja telah memperkuat persatuan bangsa tetapi juga telah mendukung berkembangnya kreativitas dan kualitas hidup masyarakat. Khusus mengenai peranan perempuan, sudah saatnya kita menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Apalagi di Indonesia, jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Oleh karena itu kita harus menghapuskan gender-bias dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, bidang usaha dan wiraswasta, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan TNI dan POLRI, karena kewajiban dan hak asasi manusia tidak mengenal perbedaan gender.

Selain meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perlindungan HAM, pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi --misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia-- sama sekali tidak akan kita tolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika dan moral yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk mewadahi aspirasi dan harapan rakyat yang berkembang, kita juga perlu menyambut baik keinginan untuk

mempertimbangkan penyempurnaan Undang-undang Dasar 1945, sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang semakin berkualitas dan tuntutan global. Seperti kita ketahui Undang-undang Dasar 1945 dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan secara konstitusional. Penyempurnaan ini dapat dilakukan pada pasal-pasal tertentu, dengan persetujuan anggota MPR yang terhormat sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian, jiwa Undang-undang Dasar 1945 --sebagaimana secara nyata diungkapkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang juga merumuskan wawasan dan cita-cita bangsa-- harus tetap kita pertahankan dan abadikan.

Dalam hal penyelesaian masalah Timor Timur, karena PBB belum mengakuinya sebagai satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia, dan hal ini selalu merugikan perjuangan bangsa kita di forum internasional, maka pemerintah telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan memberikan status khusus berupa otonomi luas sebagai bentuk penyelesaian akhir. Konsep ini merupakan penyelesaian yang paling adil, paling realistis, paling mungkin dicapai serta menjiwai perdamaian. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah merundingkan elemen-elemen substantif dari otonomi luas Timor Timur tersebut dengan Pemerintah Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Pada awal Agustus 1998 telah diadakan pertemuan Dialog Segitiga tingkat Menteri Luar Negeri di New York untuk membahas konsep penyelesaian otonomi luas tersebut, namun tidak diperoleh kesepakatan.

Atas dasar perkembangan tersebut, maka pemerintah melakukan pengkajian yang mendalam tentang alternatif penyelesaian masalah Timor Timur. Kita harus memikirkan, jika rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus, pemerintah akan mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat di MPR hasil Pemilu 1999 nanti, agar Timor Timur dapat secara terhormat, secara baik-baik dan damai berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dilakukan apabila jajak pendapat menunjukkan hasil demikian.

Perundingan segitiga tentang Timor Timur tersebut, pada tanggal 5 Mei 1999 telah menghasilkan tiga kesepakatan pokok, yaitu tentang kerangka konstitusional otonomi khusus bagi Timor Timur, persetujuan tentang modalitas penentuan pendapat melalui pemungutan suara secara langsung, dan persetujuan pengaturan keamanan. Pada tanggal 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB telah menerima secara bulat Resolusi Dewan Keamanan No. 1246 yang merupakan mandat legislatif bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk dan menggelar misi PBB di Timor Timur. Mereka akan bekerja mengatur dan melaksanakan jajak pendapat yang saat ini sudah selesai tahap pendaftarannya. Kita berharap agar jajak pendapat ini dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sehingga rakyat di Timor Timur dapat dengan leluasa menentukan masa depannya, yaitu menerima usulan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau berpisah secara baik-baik sebagaimana tercantum dalam aneks Persetujuan Pokok yang telah dicapai. Lebih dari itu, kita menginginkan tercapainya rekonsiliasi antarwarga masyarakat Timor Timur sendiri, sehingga setelah penentuan jajak pendapat rakyat Timor Timur dapat bersatu mewujudkan kehidupan yang lebih adil, sejahtera dan bahagia di masa mendatang.

Kita yakin bahwa apapun keputusan yang akan diambil oleh rakyat Timor Timur, persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terpelihara. Adalah merupakan satu fakta sejarah bahwa persatuan bangsa dan keutuhan negara merupakan kebulatan tekad bangsa Indonesia yang tidak tergoyahkan.

Dengan telah diletakkannya dasar-dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tersebut, sudah saatnya kita secara sadar menghentikan konflik yang bersifat fisik, karena cara-cara itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Mulai saat ini kebulatan tekad kita untuk memperjuangkan keadilan dan terlindunginya hak-hak asasi manusia, sebaiknya kita wujudkan melalui cara-cara yang konstitusional, demokratis, sistematis, adil, terbuka dan transparan. Dengan demikian kita akan tampil dalam

pergaulan dunia sebagai bangsa yang lebih beradab dan bermartabat. Perlu kita sadari bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan yang lebih penting lagi, kita harus memahami bahwa konflik dengan berbagai bentuk kekerasan itu sesungguhnya merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan demokrasi yang baru saja mulai kita nikmati dan bersemi di bumi Indonesia tercinta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menerangi hati kita dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh kedamaian.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati;

Permasalahan yang kita hadapi di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya sungguh cukup berat. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya juga sudah berakumulasi dan cukup memprihatinkan. Berbagai persoalan yang ditimbulkannya bukanlah terjadi dengan seketika, tetapi sudah berlangsung di dalam rentang waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang memandang, permasalahan yang kita hadapi sudah menjadi bagian dari perilaku hidup kita sehari-hari. Orang bijak pernah berkata, bahwa apabila suatu kesalahan atau kejahatan itu dibiarkan begitu saja terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka lama-kelamaan kesalahan itu akan dipandang sebagai suatu kebiasaan. Dan apabila kebiasaan tersebut tetap dibiarkan berlangsung, maka lama-kelamaan akan dipandang sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar. Walaupun demikian beratnya persoalan yang kita hadapi, saya masih berkeyakinan dan optimis, bahwa bangsa kita belumlah terpuruk sejauh itu.

Saya menyadari dan memahami sepenuhnya aspirasi yang berkembang, bahwa masyarakat sudah tidak sabar menunggu tegaknya hukum dan keadilan. Masyarakat menuntut agar kita dapat segera keluar dari krisis dan semua persoalan-persoalan bangsa dapat segera diselesaikan. Sehubungan dengan itu pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengemukakan pendekatan dan langkah-langkah yang saya ambil dalam menangani

berbagai permasalahan berat yang sedang kita hadapi. Hal ini saya sampaikan dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, dengan maksud untuk dapat berbagi rasa dan pengalaman dengan seluruh komponen bangsa.

Dalam menghadapi persoalan berat dan kerusakan bertumpuk yang terjadi, kita harus melakukan perbaikan dan perubahan secara sistematis, terpadu dan rinci. Pada dasarnya kita mempunyai dua pilihan untuk perubahan tersebut, yaitu melalui suatu revolusi atau suatu evolusi. Revolusi adalah perubahan-perubahan mendasar yang dilakukan dalam waktu yang relatif sangat singkat, dan bersifat memutuskan kaitan atau kesinambungan dengan masa lalu. Oleh karena itu suatu perubahan revolusioner tidak mudah diketahui perkembangannya dan sukar dikelola atau dikendalikan. Karena sifatnya yang acak, cepat, tak teramalkan, revolusi berisiko tinggi dalam bentuk jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang besar. Sebaliknya, evolusi adalah perubahan-perubahan yang mendasar, namun dilaksanakan secara sistematis, bertahap, terencana, terkendali dan tidak memutuskan kesinambungannya dengan masa lampau. Oleh karena itu, evolusi berisiko rendah dan pengorbanan yang terjadi --baik material maupun jiwa manusia-- yang sedikit. Jika revolusi yang kita pilih, maka satu hal yang pasti akan terjadi adalah korban jiwa maupun harta benda tidak bisa dielakkan, terutama korban yang diderita oleh rakyat yang tidak bersalah. Cukuplah kita mengalami revolusi ketika kita ingin melepaskan diri dari penjajahan pada masa perang kemerdekaan. Sudah cukup kiranya pengorbanan bangsa ini yang diberikan dengan tulus dan ikhlas demi tegaknya perikemanusiaan dan perikeadilan di bumi nusantara tercinta ini.

Walaupun kita telah merasakan pahit getirnya revolusi perang kemerdekaan, namun pada tahun 1965, Aidit dengan Partai Komunisnya pernah mencoba melakukan revolusi yang bertujuan memutuskan hubungan dengan masa lalu dengan cara menjungkirbalikkan cita-cita dan dasar negara yang sudah bersusah payah kita tegakkan. Alhamdulillah, pengkhianatan melalui revolusi

itu dapat kita gagalkan, namun akibat yang ditimbulkannya tetap menelan korban jiwa dan harta benda yang tak terbilang besarnya.

Bercermin pada pengalaman bangsa kita di dalam menghadapi perubahan melalui revolusi tersebut --dan besarnya korban yang ditimbulkannya-- maka saya dengan keteguhan hati memilih cara evolusi, atau tepatnya evolusi yang dipercepat. Oleh karena itu, maka langkah-langkah yang kita tempuh dalam mengatasi berbagai masalah bangsa, kita lakukan secara bertahap dan dalam waktu yang singkat. Pada tahap awal, kita mencoba memahami dan mengenali permasalahan yang kita hadapi, bukan hanya gejalanya saja tetapi juga akar permasalahannya. Setelah semua permasalahan kita kenali dengan baik, kemudian kita lakukan upaya-upaya untuk mengendalikan kerusakan yang ditimbulkan agar tidak meluas. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengendoran, agar ketegangan yang terjadi dapat berkurang dan persoalan yang terjadi tidak berkembang ke arah yang lebih buruk lagi. Pengendoran juga diperlukan agar masyarakat dapat dengan sabar melihat permasalahan yang terjadi dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang, sehingga kita dapat terhindar dari kekacauan sosial dan guncangan budaya. Pada tahap pengendoran inilah pemerintah juga bersikap toleran dan membuka kesempatan yang cukup luas untuk mengakomodasi pendapat dan aspirasi yang berkembang. Namun demikian toleransi ini tentu ada batasnya. Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini terombang-ambing dan terjebak ke dalam suatu kondisi yang tidak menentu yang bahkan dapat memperburuk keadaan. Di saat seperti itulah pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat, demokratis dan bijaksana, dengan memperhitungkan adanya akumulasi kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendekatan secara bertahap inilah yang telah dan akan tetap saya gunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah berat yang akan kita hadapi. Dengan penjelasan ini, saya berharap masyarakat dapat memahami duduk permasalahannya, sehingga harapan, aspirasi, maupun kritik yang disampaikan tetap berada di dalam koridor asas-asas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi

manusia yang berlaku sama bagi setiap warga negara maupun mereka yang berada di bumi Indonesia.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Sekalipun reformasi baru berjalan kurang lebih satu tahun, karena sifatnya sebagai evolusi yang dipercepat, sudah cukup banyak yang telah kita capai. Prestasi kita terbesar sebagai bangsa adalah keberhasilan kita melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil. Prestasi ini membawa kita ke gerbang demokrasi dan berpotensi menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa demokratis terbesar ketiga di dunia. Tantangan selanjutnya yang harus kita jawab bersama adalah melakukan konsolidasi demokrasi.

Perekonomian sudah menunjukkan gejala perbaikan, dan kita harapkan perekonomian akan segera pulih dan lebih tahan menghadapi berbagai gejolak eksternal serta lebih dapat memfasilitasi peran masyarakat luas, bukan hanya mereka yang besar-besar saja. Sistem hukum juga secara bertahap kita tingkatkan menuju terwujudnya supremasi hukum. Tentu saja saya menyadari ketidakpuasan masyarakat mengenai apa yang telah dicapai selama ini. Adalah wajar untuk tidak cepat puas. Namun kita juga harus menyadari beratnya tantangan yang kita hadapi serta sempitnya waktu yang tersedia.

Kita perlu menyatukan seluruh energi dan sumber daya yang ada untuk kita gunakan menjawab berbagai tantangan masa depan. Alangkah mubazirnya kalau kita menghambur-hamburkan energi yang kita miliki secara terbatas itu sekedar untuk saling menghujat, apalagi untuk memfitnah pihak lain yang tidak disukai. Sekiranya energi yang ada kita satukan pun, sebenarnya masih belum cukup kuat untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan permasalahan besar yang harus kita hadapi.

Dalam menghadapi masalah-masalah besar di masa depan, kita dituntut untuk mendahulukan sikap kenegarawanan dan sikap sebagai keluarga bangsa, daripada sikap partisan yang lebih

ditujukan untuk mencapai tujuan sesuatu golongan, yang jangkauannya bersifat sesaat dan parsial, apalagi kalau dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Rakyat kita memerlukan sikap dan buah pikiran yang bijaksana serta komunikasi atau dialog yang sehat di antara pemimpin-pemimpinnya, yaitu komunikasi yang sehat, tulus, terbuka dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga dapat menumbuhkan suasana kehidupan yang ramah dan memberikan rasa tenteram.

Akhirnya kepada Allah SWT, kita panjatkan do'a, semoga kita diberi kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran serta jalan yang lapang dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita dapat segera pulih dari krisis serta dapat melanjutkan agenda reformasi dengan sebaik-baiknya, demi tercapainya kehidupan bangsa dan negara yang kita cita-citakan bersama.

*Amien Yaa Rabbal 'Alamien*

Atas perhatian dan kesabaran Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Jakarta, 16 Agustus 1999  
Presiden Republik Indonesia

**Bacharuddin Jusuf Habibie**